

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

| | |
|-------------------|--|
| Berita | : KPK Jadikan Cimahi Pilot Project RAPKT |
| Entitas / Cakupan | : Kota Cimahi |
| Sumber / Hal | : Galamedia / Hal.6 |
| Edisi | : Senin, 16 April 2018 |

Cegah Korupsi Terintegrasi

KPK Jadikan Cimahi Pilot Project RAPKT

CIMAHI, (GM).-

Divisi Pencegahan Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadikan Kota Cimahi sebagai *pilot project* "Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi (RAPKT)". Hal itu didasarkan atas Kota Cimahi memiliki rekam jejak yang baik dalam komitmen pemberantasan korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Inspektorat Kota Cimahi, Untung Udianto. "Salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi dalam pencegahan korupsi adalah dengan memulai pembenahan sistem yang baik dan terintegrasi, dimana sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh," terang Untung melalui sambungan telepon, Minggu (15/4).

Pihaknya mengaku memiliki beberapa format yang harus diisi dan dibahas bersama, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Dari hasil monev yang sudah dilaksanakan, akan ditemukan hal yang harus dibenahi.

"Pada rapat terakhir rencana aksi se-Jawa Barat, semua kab./kota diundang. Saat itulah, Kota Cimahi ditunjuk sebagai percontohan oleh Divisi Pencegahan KPK. Berat juga mendapat kepercayaan ini, sebab kita juga masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Tapi ini akan menjadi tantangan," ujarnya.

Untung menyebutkan, ada beberapa langkah dalam rencana aksi tersebut, bahkan sebenarnya sudah terstruktur. Dari perencanaan tersebut, dibuat Sistem Perencanaan Daerah (Simrenda) yang terintegrasi masuk dalam satu sistem yang akan dikunci semua. Termasuk mulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), sehingga tidak ada program atau pembangunan yang secara tiba-tiba dibuat tanpa perencanaan sebelumnya.

"Ada 9 program perencanaan pencegahan korupsi yang akan dijalankan, sehingga tidak bisa senaknya menerobos di luar perencanaan yang sudah ada. Itu salah satu bagian pencegahan dan sistem. Semua dilakukan untuk menghindari dana siluman, agar tidak ada

anggaran yang tak jelas," jelasnya.

Untung menuturkan, guna mendukung aksi pencegahan korupsi, pihaknya membentuk bagian baru pada Pengadaan Barang dan Jasa yaitu memisahkan unit layanan pengadaan (ULP).

Tidak hanya itu, lanjutnya, rencana aksi pencegahan korupsi itu pun dilakukan dengan membenahi sistem pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Saat ini di bagian perizinan bukan hanya KPK, tapi ada pula Ombudsman dan Kemenpan-RB, serta Depdagri.

"Hanya yang jelas rencana aksinya sudah dilakukan, dan sekarang ada kelompok kerja ULP. Bentuk lainnya, banyak pembenahan-pembenahan. Sebenarnya dulu sudah bagus, tapi karena perkembangan zaman, pelayanan dan kebijakannya berubah sehingga harus dibenahi. Perubahannya terletak pada prosedur dan SOP," bebernya.

Pembenahan

Sementara aksi pencegahan korupsi yang dilakukan Bagian Keuangan, lanjutnya, di antaranya dengan memberlakukan pembayaran

non-tunai. Dimana setiap SKPD, bertransaksi melalui sistem yang langsung menyambung ke Bagian Keuangan. "Setiap pembayaran yang dilakukan SKPD, akan melalui transfer bank yang dilakukan petugas keuangan. Sekarang uang tunai yang ada di kas SKPD, terbatas maksimal Rp 5 juta," tandasnya.

Ditegaskan, penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), juga dilakukan untuk aksi pencegahan korupsi. "Mengingat penambahan pegawai terbatas, maka kami mendidik karyawan yang ada untuk mengikuti perkembangan kebijakan dengan tujuan petugas pemeriksa harus lebih tahu terkait apa yang diperiksa," ujarnya.

Kemudian yang tak kalah penting, lanjutnya, dilakukan pembenahan manajemen aparatur sipil negara (ASN) dengan melakukan *open bidding* untuk mengisi kekosongan pejabat. "Selain itu, untuk penempatan pegawai, mereka melakukan uji kompetensi agar karyawan yang ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Sementara untuk mencegah korupsi waktu, diberlakukan pula absen dengan meng-

gunakan *fingerprint*. Bila ada ASN terlambat datang, akan dilakukan pemotongan gaji," ungkapnya.

Disebutkan, aksi juga dilakukan oleh Bagian Aset dengan perombakan dan pembenahan sistem. "Selain itu ada beberapa sektor strategis dengan sistem pada setiap dinas, di antaranya Diskominfoaropus yang mengintegrasikan semua sistem," ucapnya.

Sedangkan untuk Badan Pendapatan, sambungnya, mengajukan sistem baru mulai dari pendataan PBB, pemutakhiran data, hingga pembayaran yang dilakukan melalui bank. "Setiap tahun harga tanah dan bangunan selalu berubah, sehingga dengan pemutakhiran data tersebut diharapkan akan mendorong pendapatan," imbuhnya.

Masih kata Untung, aksi pencegahan korupsi ini pun dilakukan sampai ke tingkat kecamatan dengan menggunakan sistem untuk pelayanan publiknya. "Dalam satu tahun ini, kita lakukan aksinya. Bila sudah bagus, kita tidak usah membuat rencana aksi lagi, tapi tinggal menjalani apa yang sudah ada," pungkasnya. (wis)**